DASAR PEMIKIRAN MONETER DALAM SISTEM KEUANGAN ISLAM

MAKALAH

*Ditugaskan Pada Mata Kuliah Ekonomi Moneter Islam Program
Studi Perbankan Syariah Semester 5 Tahun 2021*

Oleh :

Muhammad Zaifuddin

NIM 90500119075

Ismah Nur Rafi'ah Syam

NIM 90500119082

Dosen Pengajar

Samsul Arifai, S.A.B,M.A

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt. Atas rahmat dan hidayah- Nya sehingga penyusunan makalah ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Mauhammad saw, keluarga dan para sahabatnya. Makalah dengan judul: **“Dasar Pemikiran Moneter Dalam Sistem Keuangan Islam”** ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah Ekonomi Moneter Islam. Penulis menyadari bahwa penyelesaian makalah ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan dan dukungan berbagai pihak.

Makassar, 7 November 2021

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	3
A. Latar Belakang	3
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan	5
BAB II PEMBAHASAN.....	6
A. Tujuan Sistem Moneter dalam Sistem Keuangan Syariah.....	6
B. Urgensi Kebijakan Moneter	8
C. Sejarah Sistem Moneter Syariah	8
D. Pengembangan Sistem Moneter Syariah.....	10
E. Kebijakan Moneter Saat Pandemi Covid-19.....	12
F. Keadaan moneter pada saat ini meliputi:.....	13
BAB III PENUTUP	18
A. Kesimpulan	18
B. Saran	19
DAFTAR PUSTAKA.....	20

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ekonomi islam maupun konvensional banyak menyetujui bahwa upaya untuk mengendalikan inflasi agar tetap dalam tingkat moderat, kebijakan pemerintah (kebijakan fiskal) maupun otoritas moneter (kebijakan moneter) merupakan bagian dan upaya menahan inflasi. Apabila inflasi didefinisikan dengan kecenderungan kenaikan harga-harga secara umum, maka akan kita dapati bahwa dalam setiap perekonomian apakah itu menggunakan sistem ekonomi kapitalis ataupun islam akan senantiasa ditemui permasalahan inflasi. Hanya saja perbedaan yang cukup signifikan baik secara kuantitatif maupun kualitatif antara permasalahan inflasi yang ada didalam perekonomian islam dengan yang ada didalam perekonomian kapitalis.¹

Bila melihat sejarah lahirnya sistem-sistem ekonomi dunia, maka kita akan menemukan suatu kesamaan, yakni semua sistem yang pernah ada mempunyai tujuan untuk mencapai tingkat kesejahteraan manusia pada umumnya. Namun karena setiap sistem yang ada, selalu diwarnai dengan ideologi-ideologi penggagas atau pencetus teori ekonomi tersebut, sebut saja ekonomi kapitalis, sosialis dan Islam yang masing-masing mempunyai dasar ideologi berbeda.

Kesejahteraan dalam sistem ekonomi konvensional (kapitalis dan sosialis) mengandung arti yang berbeda, bila dalam sistem ekonomi konvensional kesejahteraan hanya diartikan dalam bentuk materi (pemuahan materi), namun dalam sistem ekonomi Islam kesejahteraan mengandung arti yang lebih luas, yakni pemuahan materi dan imateri. Hal ini mengingat manusia sebagaimana pada

¹ Samsul, S., Hamid, N. M., & Nasution, H. G (2019). Sistem Pengendalian Inflasi dalam Sistem Ekonomi Islam. *Al Azhar Journal of Islamic Economics*, 1(1), hal 20

penciptaanya yang terdiri dari dua unsur rohani dan jasmani, maka manusia juga mempunyai dua kebutuhan dasar, yakni kebutuhan fisiologis (sandang, pangan dan papan) dan kebutuhan psikologis (keamanan, ketenangan, loyalitas dan penghargaan). Kedua kebutuhan tersebut berbeda namun saling berkaitan satu dengan yang lain, jika salah satu kebutuhan tidak terpenuhi, maka akan menyebabkan kebutuhan lainnya terganggu.²

Oleh karena itu, idealnya suatu sistem ekonomi mampu menciptakan kesejahteraan umum (*general welfare*), dalam ekonomi Islam untuk menjamin kesejahteraan masyarakat, maka Negara mempunyai peranan penting yakni, Jaminan Sosial, Keseimbangan Sosial dan Intervensi negara.³ Keseimbangan berarti tidak ada ketimbangan dalam pendistribusian pendapatan masyarakat dan intervensi pemerintah dilakukan ketika pasar gagal melakukan fungsi utamanya, karena bisa jadi pasar berjalan tidak *fair* akibat pihak-pihak tertentu yang mencari keuntungan dengan tidak mengindahkan nilai-nilai sosial (dengan cara curang). Oleh karena itu dalam Islam tidak selamanya urusan ekonomi diserahkan pada pihak swasta semata, ada kalanya pemerintah sebagai pelaku utama, namun tetap dalam prinsip-prinsip kepemilikan pada kepentingan masyarakat luas.

Sistem moneter merupakan sub-sistem dari sistem ekonomi, dan merupakan penjabaran dari sistem tersebut, begitu juga dengan sistem moneter Islam, merupakan bagian dari sistem ekonomi Islam.

² Luluk Indarinul Mufidah, “Pemberdayaan ekonomi: Suatu Upaya Penanggulangan Radikalisme Terorisme”, dalam *Lentera*, Vol. 14, No. 1 (Nganjuk: STAIM, 2016).

³ M. Baqir Ash Sadr, “Our Economic”, terj. Yudi, *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtisoduna* (Jakarta: Zahra Publishing House, 2008), 455.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka pokok masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana Dasar Pemikiran Moneter Dalam Sistem Keuangan Islam Adapun sub masalah yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana tujuan sistem moneter dalam sistem keuangan syariah?
2. Bagaimana sejarah sistem moneter syariah?
3. Bagaimana pengembangan sistem moneter syariah?

C. Tujuan

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah dituangkan, maka tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui tujuan sistem moneter dalam sistem keuangan syariah.
2. Mengetahui sejarah sistem moneter syariah.
3. Mengetahui pengembangan sistem moneter syariah.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Tujuan Sistem Moneter dalam Sistem Keuangan Syariah

Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang sebagaimana diubah melalui UU No. 3 Tahun 2004 dan UU No. 6 Tahun 2009 pada pasal 7. Kestabilan rupiah yang dimaksud mempunyai dua dimensi. Dimensi pertama kestabilan nilai rupiah adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin dari perkembangan laju inflasi. Sementara itu, dimensi kedua terkait dengan perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain.

Dalam konteks perkembangan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain, Indonesia menganut sistem nilai tukar mengambang (*free floating*). Peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan. Oleh karena itu, Bank Indonesia juga menjalankan kebijakan untuk menjaga kestabilan nilai tukar agar sesuai dengan nilai Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia sejak 1 Juli 2005 menerapkan kerangka kebijakan moneter *Inflation Targeting Framework* (ITF). Kerangka kebijakan tersebut dipandang sesuai dengan mandat dan aspek kelembagaan yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Dalam kerangka ini, inflasi merupakan sasaran yang diutamakan (*overriding objective*). Bank Indonesia secara konsisten terus melakukan berbagai penyempurnaan kerangka kebijakan moneter, sesuai dengan perubahan dinamika dan tantangan perekonomian yang terjadi, guna memperkuat efektivitasnya.

Peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan. Oleh karenanya, Bank Indonesia juga menjalankan kebijakan nilai tukar untuk mengurangi volatilitas nilai tukar yang berlebihan, bukan untuk mengarahkan nilai tukar pada level tertentu. Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran-sasaran moneter (seperti uang beredar atau suku bunga) dengan tujuan utama menjaga sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah. Secara operasional, pengendalian sasaran-sasaran moneter tersebut menggunakan instrumen instrumen, antara lain operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Bank Indonesia juga dapat melakukan cara-cara pengendalian moneter berdasarkan Prinsip Syariah.⁴

⁴ Bank Indonesia, “Tujuan Kebijakan Moneter,” 2020, diakses pada tanggal 20 November <https://www.bi.go.id/id/moneter/tujuan-kebijakan/Contents/Default.aspx>

B. Urgensi Kebijakan Moneter

Secara prinsip, tujuan kebijakan moneter Islam tidak berbeda dengan tujuan kebijakan moneter secara umum, yaitu menjaga stabilitas dari mata uang (baik secara internal maupun eksternal), penciptaan instrumen keuangan yang terdiversifikasi, likuiditas, transparansi sistem keuangan, dan mekanisme pasar yang efektif sehingga pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat tercapai. Stabilitas dalam nilai uang tidak terlepas dari tujuan ketulusan dan keterbukaan dalam berhubungan dengan manusia.

Walaupun pencapaian tujuan akhirnya tidak berbeda, namun dalam pelaksanaannya secara prinsip berbeda dengan yang konvensional terutama dalam pemilihan target dan instrumennya. Perbedaan yang mendasar antara kedua jenis instrumen tersebut adalah prinsip syariah tidak membolehkan adanya jaminan terhadap nilai nominal maupun *rate return* (suku bunga). Oleh karena itu, apabila dikaitkan dengan target pelaksanaan kebijakan moneter, maka secara otomatis pelaksanaan kebijakan moneter berbasis syariah tidak memungkinkan menetapkan suku bunga sebagai target/sasaran operasionalnya.

C. Sejarah Sistem Moneter Syariah

- Orientasi Sejarah Kebijakan Moneter Rasulullah

Perekonomian jazirah arabia ketika jaman rasul merupakan ekonomi dagang bukan ekonomi yang berbasis sumber daya alam. Minyak bumi belum ditemukan dan sumber daya lainnya masih terbatas. Lalu lintas perdagangan antara romawi dan India yang melalui Arab dikenal sebagai jalur dagang selatan. Sedangkan antara Romawi dan Persia disebut sebagai jalur dagang utara. Antara Syam dan Yaman disebut jalur dagang utara selatan.

Perekonomian Arab pada jaman rosululloh, bukan ekonomi terbelakang yang hanya mengenal barter, bahkan jauh dari gambaran seperti itu. Pada masa itu telah terjadi

- a. Valuta asing dari persia dan romawi yang dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat Arab, bahkan menjadi alat bayar resminya adalah dinar dan dirham.
- b. Sistem devisa bebas ditetapkan, tidak ada halangan sedikitpun untuk mengimpor dinar dan dirham.
- c. Transaksi tidak tunai diterima secara luas dikalangan pedagang.
- d. Cek dan Promissory note lazim digunakan, misalnya Umar Bin Khottob menggunakan instrumen ini ketika melakukan impor barang-barang yang baru dari Mesir ke Madinah.
- e. Instrumen factory (anjak utang) yang baru populer pada tahun 1980-an telah dikenal dengan nama hiwalah, tetapi tentunya bebas dari unsur riba.⁵

Pada masa itu, bila penerimaan akan uang meningkat, maka dinar dan dirham diimpor. Sebaliknya bila permintaan uang turun, maka komoditaslah yang diimpor. Nilai emas maupun perak yang terkandung dalam koin dinar maupun dirham sama dengan nilai nominalnya, sehingga dapatlah dikatakan bahwa penawaran uang cukup elastis. Kelebihan penawaran uang dapat diubah menjadi barang perhiasan. Kondisi ini dapat menyebabkan permintaan dan penawaran uang cukup stabil.

⁵ Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Islam, Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 28,

Permintaan akan uang hanya untuk keperluan transaksi dan berjaga-jaga.

Permintaan uang untuk spekulasi tidak ada, dan penimbunan mata uang juga dilarang. Transaksi TalaqqiRukhban dengan mencegat penjual dari kampung diluar kota untuk mendapat keuntungan dari ketidaktahuan harga juga tak diizinkan, karena akan menimbulkan distorsi harga yang kemudian menyebabkan spekulasi.

D. Pengembangan Sistem Moneter Syariah

Dalam sebuah perekonomian Islam, permintaan terhadap uang akan lahir terutama dari motif transaksi dan tindakan berjaga-jaga yang ditentukan pada umumnya oleh tingkatan pendapatan uang dan distribusinya. Permintaan terhadap uang karena motif spekulatif pada dasarnya didorong oleh fluktuasi suku bunga pada perekonomian kapitalis. Suatu penurunan dalam suku bunga dibarengi dengan harapan tentang kenaikannya akan mendorong individu dan perusahaan untuk meningkatkan jumlah uang yang dipegang. Karena suku bunga seringkali berfluktuasi pada perekonomian kapitalis, terjadilah perubahan terus-menerus dalam jumlah uang yang dipegang oleh publik. Penghapusan bunga dan kewajiban membayar zakat dengan laju 2,5 persen per tahun tidak saja akan meminimalkan permintaan spekulatif terhadap uang dan mengurangi efek suku bunga terkunci, tetapi juga akan memberikan stabilitas yang lebih besar bagi permintaan total terhadap uang.

Hal ini lebih jauh akan diperkuat oleh sejumlah faktor antara lain sebagai berikut:

- a. Aset pembawa bunga tidak akan tersedia dalam sebuah perekonomian Islam, sehingga orang yang hanya memegang dana likuid menghadapi pilihan apakah tidak mau terlibat dengan resiko dan tetap memegang uangnya dalam bentuk *cash* tanpa

memperoleh keuntungan, atau turut berbagi resiko dan menginvestasikan uangnya pada aset bagi hasil sehingga mendapatkan keuntungan.

b. Peluang investasi jangka pendek dan panjang dengan berbagai tingkatan resiko akan tersedia bagi para investor tanpa memandang apakah mereka adalah pengambil resiko tinggi atau rendah, sejauh mana resiko yang dapat diperkirakan akan diganti dengan laju keuntungan yang diharapkan.

c. Barangkali dapat diasumsikan bahwa –kecuali dalam keadaan resesi– tak akan ada pemegang dana yang cukup irasional untuk menyimpan sisa uangnya setelah dikurangi oleh keperluan-keperluan transaksi dan berjaga-jaga selama ia dapat menggunakan sisanya yang menganggur untuk melakukan investasi pada aset bagi hasil untuk menggantikan paling tidak sebagian efek erosi zakat dan inflasi, sejauh dimungkinkan dalam sebuah perekonomian Islam.

d. Laju keuntungan –bebeda dari laju suku bunga– tidak akan ditentukan di depan. Satu-satunya yang akan ditentukan di depan adalah rasio bagi hasil, ini tidak akan mengalami fluktuasi, seperti halnya suku bunga karena ia akan didasarkan pada konvensi ekonomi dan sosial, dan setiap ada perubahan didalamnya akan terjadi lewat tekanan kekuatan-kekuatan pasar sesudah terjadi negosiasi yang cukup lama. Jika prospek ekonomi cerah, keuntungan secara otomatis akan meningkat. Karena itu, tidak ada apa pun yang didapat dengan menunggu.⁶

⁶ Muhammad, *Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Salemba Empat,

E. Kebijakan Moneter Saat Pandemi Covid-19

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 12-13 Oktober 2020 memutuskan untuk mempertahankan BI *7-Day Reverse Repo Rate* (BI7DRR) sebesar 4,00%, suku bunga *Deposit Facility* sebesar 3,25%, dan suku bunga *Lending Facility* sebesar 4,75%. Keputusan ini mempertimbangkan perlunya menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah, di tengah inflasi yang diperkirakan tetap rendah. Bank Indonesia menekankan pada jalur kuantitas melalui penyediaan likuiditas, termasuk dukungan Bank Indonesia kepada Pemerintah dalam mempercepat realisasi APBN tahun 2020, guna mendorong pemulihan ekonomi dari dampak pandemi COVID-19. Di samping keputusan tersebut, Bank Indonesia menempuh pula langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melanjutkan kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah agar sejalan dengan fundamental dan mekanisme pasar;
2. Memperkuat strategi operasi moneter guna memperkuat stance kebijakan moneter akomodatif;
3. Mempercepat langkah-langkah pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing melalui pengembangan infrastruktur sarana penyelenggara transaksi berbasis sistem elektronik (*Electronic Trading Platform/ETP*) dan lembaga sentral kliring, novasi, dan transaksi (*Central Counterparty/CCP*);
4. Memperkuat implementasi kebijakan untuk mendorong UMKM melalui korporatisasi, peningkatan kapasitas, akses pembiayaan, dan digitalisasi sejalan dengan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) serta Memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan digital melalui penggunaan c kolaborasi bank, *fintech*, dan *e-commerce* untuk mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN);

F. Keadaan moneter pada saat ini meliputi:

- ✚ Perbaikan perekonomian global berlanjut sesuai prakiraan sebelumnya.
- ✚ Pertumbuhan ekonomi domestik secara perlahan juga membaik, terutama didorong stimulus fiskal dan perbaikan ekspor.
- ✚ Ketahanan sektor eksternal Indonesia pada triwulan III 2020 tetap terjaga, di tengah dinamika penyesuaian aliran modal global.
- ✚ Nilai tukar Rupiah tetap terkendali didukung langkah- langkah stabilisasi Bank Indonesia.
- ✚ Inflasi tetap rendah sejalan permintaan yang belum kuat dan pasokan yang memadai.
- ✚ Sejalan dengan kebijakan moneter dan makroprudensial akomodatif yang ditempuh Bank Indonesia, kondisi likuiditas tetap longgar sehingga mendorong suku bunga terus menurun dan mendukung pembiayaan perekonomian.
- ✚ Sinergi ekspansi moneter Bank Indonesia dengan akselerasi stimulus fiskal Pemerintah dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional terus diperkuat.
- ✚ Ketahanan sistem keuangan tetap kuat, meskipun risiko dari meluasnya dampak COVID-19 terhadap stabilitas sistem keuangan terus dicermati.⁷

⁷ Bank Indonesia, “Tinjauan Kebijakan Moneter Oktober 2020,” 2020, diakses pada tanggal 20 November 2020 pukul 19.05 di <https://www.bi.go.id/id/publikasi/kebijakan-moneter/tinjauan/Pages/Tinjauan-Kebijakan-Moneter-Oktober-2020.aspx>.

- Jadi minimnya menghindari diri dari pengaplikasian riba itu dikarekan kita lebih mengenal praktek ekonomi konvensional kita sudah terbiasa dengan konvensional. Ekonomi konvensional telah jauh dikenal lebih dahulu ketimbang ekonomi Syari'ah, ekonomi konvensional telah menyentuh setiap aspek kehidupan manusia dari produksi, distribusi hingga konsumsi, selain itu masih banyak masyarakat menyepelekan dampak dari riba masyarakat tidak tahu bahwa riba itu adalah dosa yang lebih besar dari pada zina faktor kurangnya wawasan tentang bahaya riba inilah yang mengakibatkan banyaknya orang-orang tidak memperdulikan riba tersebut.
- Pemikiran seperti inilah harusnya kita ubah, maka dari itu hari ini kita belajar mengenai pemikiran islam agar kita sebagai mahasiswa kelak akan menjadi masyarakat dan menuntun orang banyak untuk mengedepankan pemikiran pemikiran islam termasuk menjauhi praktek riba.
- Jikalau di hadapkan antara dua pilih baik itu sistem keuangan konvensional dengan sistem keuangan islam yg manakah dr segi pemahaman pemateri yg dapat menanggulangi segala macam problem terkait keuangan di negeri kita dan apa alasannya?
- Pertama, Islam mendorong pertumbuhan ekonomi yang memberi manfaat luas bagi masyarakat (pro-poor growth). Islam mencapai pro-poor growth melalui dua jalur utama: pelarangan riba dan mendorong kegiatan sektor riil. Pelarangan riba secara efektif akan mengendalikan inflasi sehingga daya beli masyarakat terjaga dan stabilitas perekonomian tercipta. Bersamaan dengan itu, Islam mengarahkan modal pada kegiatan ekonomi produktif melalui kerja sama ekonomi dan bisnis seperti mudarabah, muzara'ah dan musaqah. Dengan demikian, tercipta keselarasan antara sektor riil dan moneter sehingga pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung secara berkesinambungan.
- Kedua, Islam mendorong penciptaan anggaran negara yang memihak pada kepentingan rakyat banyak (pro-poor budgeting). Dalam sejarah Islam, terdapat tiga prinsip utama dalam mencapai pro-poor budgeting yaitu: disiplin fiskal yang ketat, tata kelola pemerintahan yang baik dan penggunaan anggaran negara sepenuhnya untuk kepentingan publik. Tidak pernah terjadi defisit anggaran

dalam pemerintahan Islam walau tekanan pengeluaran sangat tinggi, kecuali sekali saja. Di dalam Islam, anggaran negara adalah harta publik sehingga anggaran menjadi sangat responsif terhadap kepentingan orang miskin.

- Ketiga, Islam mendorong pembangunan infrastruktur yang memberi manfaat luas bagi masyarakat (pro-poor infrastructure). Islam mendorong pembangunan infrastruktur yang memiliki dampak eksternalitas positif dalam rangka meningkatkan kapasitas dan efisiensi perekonomian. Nabi Muhammad SAW membagikan tanah di Madinah kepada masyarakat untuk membangun perumahan, mendirikan permandian umum di sudut kota, membangun pasar, memperluas jaringan jalan, dan memperhatikan jasa pos. Khalifah Umar bin al-Khattab membangun kota Kufah dan Basrah dengan memberi perhatian khusus pada jalan raya dan pembangunan masjid di pusat kota. Beliau juga memerintahkan Gubernur Mesir, Amr bin Ash, untuk mempergunakan sepertiga penerimaan Mesir untuk pembangunan jembatan, kanal dan jaringan air bersih.
- Keempat, Islam mendorong penyediaan pelayanan publik dasar yang berpihak pada masyarakat luas (pro-poor public services). Terdapat tiga bidang pelayanan publik yang mendapat perhatian Islam secara serius: birokrasi, pendidikan dan kesehatan. Di dalam Islam, birokrasi adalah amanah untuk melayani publik, bukan untuk kepentingan diri sendiri atau golongan. Khalifah Usman tidak mengambil gaji dari kantornya. Khalifah Ali membersihkan birokrasi dengan memecat pejabat-pejabat publik yang korup. Selain itu, Islam juga mendorong pembangunan pendidikan dan kesehatan sebagai sumber produktivitas untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang
- Kelima, Islam mendorong kebijakan pemerataan dan distribusi pendapatan yang memihak rakyat miskin. Terdapat tiga instrument utama dalam Islam terkait distribusi pendapatan yaitu aturan kepemilikan tanah, penerapan zakat, serta menganjurkan qardul hasan, infak dan wakaf dan ini sangat penting.
- Stabilitas dalam nilai uang tidak terlepas dari tujuan ketulusan dan keterbukaan dalam berhubungan dengan manusia. Walaupun pencapaian tujuan akhirnya tidak berbeda, namun dalam pelaksanaannya secara prinsip berbeda dengan yang konvensional terutama dalam pemilihan target dan instrumennya. Perbedaan yang mendasar antara kedua jenis instrumen tersebut adalah prinsip syariah tidak

membolehkan adanya jaminan terhadap nilai nominal maupun rate return (suku bunga). Dalam sistem moneter konvensional, instrumen yang dijadikan alat kebijakan moneter pada dasarnya ditunjukkan untuk mengendalikan uang beredar di masyarakat adalah bunga. Sementara dalam Islam tidak memperkenankan instrumen bunga eksis di pasar. Fokus kebijakan moneter Islam lebih tertuju pada pemeliharaan berputarnya sumber daya ekonomi. Dengan demikian, secara sederhana para regulator harus memastikan tersedianya usaha-usaha ekonomi dan produk keuangan syariah yang mampu menyerap potensi investasi masyarakat. Oleh karena itu, apabila dikaitkan dengan target pelaksanaan kebijakan moneter, maka secara otomatis pelaksanaan kebijakan moneter berbasis syariah tidak memungkinkan.

- Fungsi dari kebijakan moneter dalam sistem keuangan Islam yaitu :
 1. menjaga stabilitas dari mata uang (baik secara internal maupun eksternal),
 2. Penciptaan instrumen keuangan yang terdiversifikasi. likuiditas, transparansi sistem keuangan, dan mekanisme pasar yang efektif sehingga pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat tercapai.
 3. untuk menjaga kestabilan nilai tukar agar sesuai dengan nilai Dalam upaya mencapai keinginan.
- Pengaruh perekonomian kebijakan moneter sistem keuangan dalam Islam adalah dalam instrumen kebijakannya tidak meninggalkan ideologi ekonomi Islam dan tidak pula meninggalkan kebutuhan akan imbal hasil ekonomi bagi pelaku ekonomi yakni bagi hasil. Yang kemudian diharapkan dapat memenuhi kebutuhan manusia akan materi dan immateri, sehingga kesejahteraan hakiki dapat dicapai.
- Sejalan dengan kebijakan moneter dan makroprudensial akomodatif yang ditempuh Bank Indonesia, kondisi likuiditas tetap longgar, sehingga mendorong suku bunga terus menurun dan mendukung pembiayaan perekonomian. Hingga 15 Desember 2020, Bank Indonesia telah menambah likuiditas (quantitative easing) di perbankan sekitar Rp694,87 triliun, terutama bersumber dari penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) sekitar Rp155 triliun dan ekspansi moneter sekitar Rp524,07 triliun. Longgarnya kondisi likuiditas mendorong tingginya rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga

(AL/DPK) yakni 31,52% pada November 2020 dan rendahnya rata-rata suku bunga PUAB overnight, sekitar 3,20% pada November 2020. Longgarnya likuiditas serta penurunan BI7DRR berkontribusi menurunkan suku bunga deposito dan kredit modal kerja dari 4,93% dan 9,38% pada Oktober 2020 menjadi 4,74% dan 9,32% pada November 2020. Penurunan suku bunga kredit diperkirakan akan berlanjut dengan longgarnya likuiditas dan rendahnya suku bunga kebijakan Bank Indonesia. Imbal hasil SBN 10 tahun turun dari 6,16% pada akhir November 2020 menjadi 6,07% pada 16 Desember 2020. Dari besaran moneter, pertumbuhan besaran moneter M1 dan M2 pada November 2020 tetap tinggi, yaitu sebesar 15,8% (yoy) dan 12,2% (yoy). Ke depan, ekspansi moneter Bank Indonesia dan percepatan realisasi anggaran serta program restrukturisasi kredit perbankan diharapkan dapat mendorong penyaluran kredit dan pembiayaan bagi pemulihan ekonomi nasional.

BAB III

PENUTUP

A. *Kesimpulan*

Pada dasarnya sistem moneter akan selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat akan sistem moneter tersebut. Dari pemaparan tentang sistem moneter Islam, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, tujuan sistem moneter Islam antara lain: kesempatan kerja penuh dan laju pertumbuhan ekonomi yang optimal, keadilan sosio-ekonomi dan distribusi kekayaan dan pendapatan yang merata, stabilitas nilai tukar mata uang, mobilisasi investasi dan tabungan untuk pembangunan perekonomian serta memberikan semua bentuk pelayanan yang efektif yang secara normal diharapkan dari sistem perbankan.

Kedua, tujuan-tujuan kebijakan moneter itu tidak dapat dicapai tanpa adanya suatu strategi yang tepat. Di sinilah Islam memiliki keunggulan nyata, bukan saja tujuan-tujuan yang merupakan bagian integral dari ideologi Islam, tetapi juga sebagian strategi merupakan dari syariah dan tidak dapat dipisahkan. Strategi moneter Islam adalah dengan penghapusan suku bunga dan kewajiban pembayaran pajak atas biaya produktif yang menganggur, sehingga akan menghilangkan inisiatif orang untuk memegang uang *idle* sehingga mendorong orang untuk melakukan: *Qard* (meminjamkan harta kepada orang lain), Penjualan *Muajjal*, serta *Mudārabah*.

Ketiga, Instrumen kebijakan moneter Islam terbagi menjadi tiga mazhab berdasarkan zaman dan kebutuhan masyarakat pada waktu itu.

Instrumen yang diperkenalkan oleh mazhab *iqtisāduna* adalah *Promissory Notes* atau *Bill Of Exchange* semacam surat untuk mendapatkan dana segar. Mazhab kedua adalah mazhab mainstream instrumen yang digunakan adalah *Dues of Idle Fund* adalah instrumen kebijakan yang dikenakan pada semua aset produktif yang idle. Mazhab ketiga mazhab alternatif sistem moneter yang dianjurkan oleh mazhab ketiga ini adalah *Syuratiq Process* yaitu di mana suatu kebijakan yang diambil oleh otoritas moneter adalah berdasarkan musyawarah sebelumnya dengan sektor riil.

Yang menjadi ciri khas utama dari sistem moneter Islam adalah dalam instrumen kebijakannya tidak meninggalkan ideologi ekonomi Islam dan tidak pula menanggalkan kebutuhan akan imbal hasil ekonomi bagi pelaku ekonomi yakni bagi hasil. Yang kemudian diharapkan dapat memenuhi kebutuhan manusia akan materi dan immateri, sehingga kesejahteraan hakiki dapat dicapai.

B. Saran

Akhirnya penulis menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat kekurangan dalam penulisan makalah ini, makalah ini hanya bertujuan untuk menambah wawasan kepada pembaca

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia, “Tinjauan Kebijakan Moneter Oktober 2020,”
<https://www.bi.go.id/id/publikasi/kebijakan-moneter/tinjauan/Pages/Tinjauan-Kebijakan-Moneter-Oktober-2020.aspx>.
- Islam: Iqtisoduna (Jakarta: Zahra Publishing House, 2008), 455.
- Karim, Adiwarman A. *Ekonomi Makro Islam, Edidi Kedua*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada., 2010.
- Luluk indarinul Mufidah, “Pemberdayaan ekonomi: Suatu Upaya Penanggulungan Radikalisme Terorisme”, dalam *Lentera*, Vol. 14, No. 1 (Nganjuk: STAIM, 2016).
- M. Baqir Ash Sadr, “*Our Economic*”, terj. Yudi, Buku Induk Ekonomi
- Muhammad, *Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: Salemba Empat, 2002.
- Samsul, S., Hamid, N. M., & Nasution, H. G. (2019). Sistem Pengendalian Inflasi dalam Sistem Ekonomi Islam. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 1(1), 16-28.